

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi membuat semakin ketatnya persaingan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Ketatnya persaingan di bidang ekonomi membuat meningkatnya kebutuhan akan informasi laporan keuangan dari berbagai pihak. Perusahaan sektor publik adalah perusahaan nirlaba yang mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan hasil pertanggungjawaban yang dihasilkan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena saat ini yang begitu sering ditunjukkan kepada pemerintah pusat maupun daerah adalah tuntutan akan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas (Bastian, 2007:4). Hal ini disebabkan oleh maraknya penyelewengan di bidang akuntansi sektor publik. Masyarakat mengharapkan adanya perubahan yang akan menunjang terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siwambudi dkk, 2017).

Reformasi adalah tonggak awal perkembangan akuntansi sektor publik. Tujuan dari reformasi adalah terciptanya masyarakat madani, terciptanya good governance dan pengembangan model pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, semenjak reformasi pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan secara akuntabilitas. Pengelolaan keuangan tersebut, didasarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No.33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan Pemerintah yang baik atau *good governance* adalah adanya kewajiban oleh setiap satuan kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Siwambudi dkk, 2017).

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 31, menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Hasil Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan ini kemudian disusun oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) berdasarkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. LKPD yang disajikan pemerintah daerah tersebut, harus mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kudus per 2017 diubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 (Badera dkk, 2017).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, dimana laporan tersebut adalah gambaran pencapaian kinerja dari program dan kegiatan

serta kemajuan realisasi dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan (Bastian, 2007:97). Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas sektor publik yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan demi tercapainya tujuan pengguna informasi. Sedangkan secara khusus laporan keuangan sektor publik bertujuan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan (Bastian, 2006:247). Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh sangat besar terhadap kualitas keputusan bagi pemakai laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:160). Adapun pemakai laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut: Legislatif dan manajemen sektor publik, Masyarakat, Investor dan kreditur, Institusi internasional, Pengamat, Aparat sektor publik. Hampir seluruh elemen masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan (Bastian, 2009:128).

Kualitas laporan keuangan adalah ciri khas yang dipenuhi sehingga membuat informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan (Bastian, 2009:133). Jadi, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan

tersebut memenuhi standar tertentu. Standar kualitas laporan keuangan tersebut, terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif yang konsisten, relevan, netral, dapat dibandingkan dan dapat dindalkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan (Siwambudi dkk, 2017).

Kualitas laporan keuangan dapat semakin meningkat apabila profesionalisme pengelolaan keuangan dari setiap pegawai juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2017) pada DISPENDA Kabupaten Gianjar menyatakan bahwa profesionalisme pengelolaan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Rahayu dkk, 2017). Profesionalisme adalah tingkah laku atau kualitas seseorang yang profesional yang selalu mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional. Tanpa adanya profesionalisme dalam pengelolaan laporan keuangan, maka penimpangan-penyimpangan terhadap standar kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan laporan keuangan supaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rahayu dkk, 2017).

Profesionalisme pengelolaan keuangan akan tercermin dari adanya pemanfaatan teknologi yang digunakan. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan juga pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Rahayu dkk,

2017). Menurut Wijaya (2007) dalam jurnal Rahayu, dkk (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang di harapkan oleh *user* terhadap sistem informasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau dalam arti lain suatu tindakan dengan menggunakan teknologi informasi pada saat melakukan suatu pekerjaan (Rahayu dkk, 2017).

Penelitian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah di lakukan oleh Yuliani, dkk (2016) di OPD Kabupaten Magelang. Studi ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Yuliani dkk, 2016). Selain ini penelitian yang dilakukan oleh Harlinda (2016) pada OPD di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Harlinda, 2016). Penelitian Rahayu, dkk (2017) yang dilakukan pada DISPENDA Kabupaten Gianyar dengan menggunakan metode sampling juga menunjukkan hasil studi empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Rahayu dkk, 2017).

Secara umum pemanfaatan teknologi sangat bermanfaat untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien hanya saja perlu adanya pengendalian internal yang baik dari suatu instansi. Pemerintah daerah harus mampu membangun sistem pengendalian yang kuat dan tidak kompromi supaya dapat mengatasi segala bentuk penyelewengan keuangan negara, korupsi, dan pemborosan anggaran. Sistem pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan

mengukur sumber daya organisasi serta mencegah dan mendeteksi kecurangan (Evicahyani dkk, 2016).

Ada perbedaan signifikan terhadap pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan dibuktikan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2017), Siwambudi, dkk (2017), Wahyuni, dkk (2017), Widari, dkk (2017), Hakim (2017) dan Evicahyani, dkk (2016). Berbeda dengan penelitian Yuliani, dkk (2016) yang dilakukan di OPD Kabupaten Magelang. Studi ini membuktikan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengendalian internal dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan kuatnya motivasi dari setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab. Kinerja pegawai pemerintah bukan hanya diukur secara finansial tetapi juga secara instrinsik dan salah satu faktor instrinsik tersebut adalah motivasi, yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan (Lodhrakentjana dkk, 2014). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tentunya harus mendapatkan dorongan motivasi yang kuat dan benar. Motivasi seseorang akan menentukan hasil kerja baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, karena motivasi adalah hasrat yang menggerakkan seseorang mencapai sasaran. Selain itu, motivasi juga adalah kontrol pada saat seseorang mengalami frustrasi karena kegagalan maupun kejenuhan dalam bekerja atau melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pentingnya suatu instansi mengontrol motivasi dari setiap pegawainya,

supaya tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diteliti oleh Lodhrakentjana, dkk (2014) pada OPD dan SKPKD Pemerintah kota Depok (Lodhrakentjana dkk, 2014).

Untuk mengetahui bahwa laporan keuangan suatu entitas sektor publik sudah memenuhi standar yang berlaku dan bermanfaat bagi para pemakai informasi, maka laporan tersebut setiap tahunnya di audit oleh Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan di periksa dan diberi opini oleh BPK. Opini yang diberikan BPK RI terhadap LKPD adalah cerminan dari kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Selain itu, opini BPK RI juga menunjukkan kualitas dari laporan keuangan suatu etitas sektor publik. Ada empat opini yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD, diantaranya : Opini Wajar tanpa pengecualian(WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak wajar (TW) dan Tidak memberikan pendapat (TMP) (Siwambudi dkk, 2017).

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widari, dkk (2017) menyatakan bahwa berdasarkan data opini laporan keuangan pemerintah daerah per 2010-2014 yang diperoleh, menyimpulkan jika laporan keuangan pemerintah tingkat provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah tingkat kabupaten. Hasil perolehan opini pemerintah provinsi dan kota adalah WTP 90% serta WDP 93%.

Sedangkan untuk pemerintah kabupaten perolehan opini WTP dan WDP hanya berkisar 81%. (Widari dkk, 2017).

Hal serupa juga di tunjukkan oleh data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan Yuliani, dkk (2016). Data tersebut menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah masih rendah. Hal ini dikemukakan oleh ketua badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI) Harry Azhar Aziz dalam keterangan pers usai sosialisasi di Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2014. Harry mengatakan bahwa pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporannya. Penilaian tersebut didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Yuliani dkk, 2016).

Fenomena tersebut juga merupakan cerminan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Berdasarkan berita BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 disebutkan bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten Kudus memperoleh opini WTP-DPP. Pokok-pokok pengecualian tersebut antara lain : Nilai Aset tetap tidak tercatat, tidak diketahui nilai dan rincian asetnya sehingga penyajian saldo asset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya serta lemahnya pengendalian intern (<http://semarang.bpk.go.id/?p=5714>).

Berdasarkan uraian diatas, fenomena tersebut sangat menarik untuk dijadikan judul penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2017). Penelitian tersebut menguji 3 variabel

yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu sampel dalam penelitian Rahayu, dkk (2017) dilakukan pada salah satu dinas di Kabupaten Gianyar yaitu Dinas Pendapatan Daerah di Gianyar. Keterbatasan penelitian tersebut adalah hanya menggunakan 3 variabel yaitu variabel Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan TI, dan Pengendalian Internal, sedangkan berdasarkan uraian diatas profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan TI dan pengendalian internal dapat berjalan dengan baik apabila motivasi kerja setiap pegawai keuangan kabupaten Kudus juga tinggi. Lodhrakentjana, dkk (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada OPD dan SKPKD Pemerintah kota Depok (Lodhrakentjana dkk, 2014).

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka penelitian ini menambahkan Motivasi sebagai variabel independen untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan daerah. Penambahan variabel tersebut merupakan saran yang dikemukakan oleh Rahayu, dkk (2017) pada akhir penelitiannya. Selain itu, sampel dalam penelitian ini adalah responden pada OPD kabupaten Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan motivasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, Pengendalian Internal Dan Motivasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Studi Empiris, OPD Kabupaten Kudus).

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mengantisipasi pelebaran pembahasan yang mengakibatkan salah tafsir terhadap maksud serta tujuan penelitian ini, berikut adalah ruang lingkup batasan masalah yang akan dibahas, diantaranya

1. Penelitian ini fokus pada Variabel Dependen yaitu Kualitas laporan keuangan serta Variabel Independen yaitu Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Motivasi.
2. Penelitian ini fokus pada objek yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
3. Penelitian ini fokus pada sampel yaitu pegawai atau staf bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus?
2. Apakah pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus?

3. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus?
4. Apakah motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji secara empiris pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji secara empiris motivasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi OPD Kabupaten Kudus, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pemahaman terkait pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Motivasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat memahami pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Motivasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan terait akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk meneliti dan mengkaji terkait penelitian serupa.

